

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

- Amiruddin & Asikin, Z. (2014) Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Persada.
- Arifin, S. (2012) Pengantar Hukum Indonesia. Medan: Medan Area University Press.
- Arifuddin, Q. et al. (2025) Metodologi Penelitian Hukum. Padang: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Arikunto, S. (2010) Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bakri, I.S. (2019) Reforma Agraria dan Dinamika Pergeseran Pola Penguasaan Lahan Sawah di Indonesia. Bukuta Cipta Litera.
- Efata, A.C., Retno Mawarini, S. & SH, M. (2025) Dekonstruksi Hukum Dalam Pengaturan Alih Fungsi Lahan Untuk Menjamin Kepastian Hukum. Surabaya: Untag Press.
- Efendi, J. & Rijadi, P.R. (2022) Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Prenada Media.
- Ginting, E. (2023) Kompensasi dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian. Medan: Pustaka Cendekia.
- Gunardi (2022) Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Jakarta.
- Halimah, A.S. (2024) Monograf: Makna Konversi Lahan bagi Petani dan Pemangku Kepentingan Lainnya. Penerbit P4I.
- Harsono, B. (2003) Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
- Harsono, B. (2005) Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
- Harsono, B. (2008) Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Edisi Revisi. Jakarta: Djambatan.

- Hidayat, A. (2020) Sistem Hukum Pertanahan dan Tata Ruang. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Iman, M. (2021) Perubahan Alih Fungsi Lahan. Yogyakarta Deepublish.
- Mancur Sinaga, A. & Saleh, I.N. (2025) Filsafat Hukum Teori dan Prinsip Hukum di Indonesia. Padang Sonpedia Publishing Indonesia.
- Muhammad, A. (2013) Hukum Pengangkutan Niaga. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mustafa, B. (1984) Hukum Agraria dalam Perspektif. Bandung: Remadja Karya CV.
- Prayitno, G. et al. (2022) Ruang Berketahanan Pangan: Menjawab Tantangan Produksi Pangan Berkelanjutan dengan Optimasi Keruangan Menuju Indonesia Berdaulat. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Rahardjo, S. (2003) Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Kompas.
- Salim HS & Nurbani, E.S. (2009) Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua. Jakarta: Rajawali Pres.
- Santoso, U. (2010) Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana.
- Santoso, U. (2012) Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Jakarta: Prenada Media Group.
- Santoso, U. (2012) Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Jakarta: Kencana.
- Santoso, U. (2018) Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sihombing, I.E. (2005) Segi-segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Soekanto, S. (1990) Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris. Jakarta: IND-HILL-CO.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2007) Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2009) Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R.H. (1990) Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudrajat, T. (2022) Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudrajat, T. & Wijaya, E. (2021) Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sunggono, B. (2013) Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Harvarindo.
- Suratman & Dillah, P. (2012) Metode Penelitian Hukum. Bandung: CV. Alfabet.
- Sutedi, A. (2009) Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suteki, S. & Taufani, G. (2018) Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Persada.
- Suyanto, V.S., Tedjosaputro, L. & Masriani, Y.T. (2024) Penguatan Pengaturan Proses Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan. Jakarta: Penerbit Lawwana.
- Universitas Samudra (2015) Metode Penelitian. Medan.
- Wantjik, K. (1982) Hak Anda Atas Tanah. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zubaidah, S. (2021) Kajian Ekonomi dan Sosial Perlindungan Lahan Pertanian. Surabaya: Airlangga University Press.
- Zulkaidah (2011) Tanggung Jawab Sosial. Jakarta: Lajnah Pentashihan.

## **B. Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Jabatan PPAT.

### **C. Jurnal/Tesis dan Sumber Lainnya**

Asra, A. (2019) Perlindungan Lahan Sawah Pertanian Pangan Berkelanjutan Jurnal Agribisnis Dan Pengembangan Perdesaan, 3 (2),

Afufah, F. & Warjiyanti, S. (2024) Tujuan Hukum dan Kedudukan Hukum Jurnal Ilmiah Hukum Wijaya Putra, 2 (2).

Erawati, W.R. (2025) Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam proses balik nama sertipikat hak atas tanah berbasis nilai keadilan. Disertasi Doktoral. Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Chomzah, A.A. (2004) Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Pranata Hukum, 10 (1).

Destriana, A. & Allagan, T.M.P. (2022) Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Administrasi Pertanahan Melalui Sertipikat Tanah Elektronik PALAR (Pakuan Law Review), 8 (1).

Djohan, M.O.E. (2015) Tugas dan Fungsi BPN dalam Pendaftaran Tanah Pranata Hukum, 10 (1).

Fajar, M. & Achmad, Y. (2010) Dualitas Metode Penelitian Hukum Empiris & Normatif Jurnal Gema Keadilan, 7 (1).

Firman, T. & Hudalah, D. (2021) The Governance of Land Use and Spatial Planning in Metropolitan Indonesia: A Political Economy Perspective Journal of Planning Education and Research, 41(2).

Hadjon, P.M. (1997) Tentang Wewenang Jurnal Pro Justisia, Yuridika, No. 5 dan 6 tahun XII.

Hafizah, N. et al. (2024) Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Indragiri Hilir AL-DALIL, 2 (2).

Hayuningtyas, F.R. & Nursadi, H. (2024) Sinkronisasi Peta LSD Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 9 (1).

Kurniawan, M. & Hadi, S. (2020) The Transition of Land Rights in Protected Rice Field Areas: Challenges and Regulations Indonesian Journal of Land Policy, 34 (2).

Murni, C.S. (2021) Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Proses Peralihan Jual Beli Hak atas Tanah Jurnal Kajian Pembaruan Hukum, 1 (1).

Nurfauziyah, F. & Putra, M.F.M. (2022) Implementasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah terhadap Para Pelaku Bisnis Perumahan Jurnal Hukum, 7 (11).

Prakoso, L.Y. (2021) Tantangan Penegakan Sanksi Pidana dalam Kasus Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 8 (1).

Pramesthy H.K., A. et al. (2023) Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi terhadap Ketahanan Pangan Pedesaan di Kabupaten Jember Inicío Legis, 4(2),

Prasada, I. & Rosa, T.A. (2018) Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah terhadap Ketahanan Pangan di DIY Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 14(3).

Rahayu, S. & Hidayat, A. (2023) Faktor Sosio-Ekonomi yang Mempengaruhi Keputusan Petani dalam Menjual Lahan Sawah di Kawasan Peri-Urban Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, 7 (2).

Ratnasari, P. (2021) Kebijakan Perumahan bagi MBR di Kota Palangka Raya Jurnal Administrasi Publik, 7 (1).

Robbi, Y.F.N. (2024) Aspek Hukum Lahan Sawah Dilindungi dan Tata Ruang Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 13(2).

Safitri, R. (2020) Kebijakan Perlindungan Lahan Sawah Dilindungi dalam Perspektif Ketahanan Pangan Jurnal Hukum & Pembangunan, 50 (2).

Saptana & Ashari (2007) Perlindungan Lahan Pertanian dalam Mendukung Kemandirian Pangan Forum Penelitian Agro Ekonomi, 25(1).

Sari, A.P. (2025) Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Pada Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Sistem Pertanahan Digital Journal of Innovation Research and Knowledge, 5 (1).

Sari, D.N. & Budhianti, M.I. (2022) Lahan Sawah Dilindungi Dikaitkan Dengan Rencana Tata Ruang Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Reformasi Hukum Trisakti, 5 (4).

Sidharta, B.A. (2016) Kepentingan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia Suara Hukum.

Sitohang, E. & Siambaton, T. (2021) Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Jurnal Hukum Patik, 10 (1).

Suhardini, A.P., Imanudin, I. & Sukarmi, S. (2018) Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik Jurnal Akta, 5(1).

Sulaiman, R. (2018) The Environmental Impacts of Land Conversion in Agricultural Areas Journal of Sustainable Land Use, 22(1),

Susanto, D., Wibowo, A. & Sugiarto, H. (2022) 'Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah:

Studi Kasus Kabupaten Karawang Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 18(3).

Utami, D.H., Djakfar, E. & Anggraini, D. (2020) Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah Pertanian Yang Belum Memenuhi Ketentuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Jurnal Ilmu Hukum,

Viona, M. et al. (2025) Ekonomi Politik Ketahanan Pangan di Indonesia: Peran Negara Dalam Menghadapi Krisis Pangan Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2(11).

Wibawa, I.G.P.P. & Widiatedja, I.G.N.P. (2025) Hilangnya Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Akibat Alih Fungsi Lahan Di Atas Tanah Hak Milik Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 10 (02).

Widyawati, A. (2011) Dilema Penerapan Asas Retroaktif di Indonesia', Jurnal Pandecta, 6 (2).

Wirawan, I.B. (2020) Peran BPN dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Jurnal Hukum Agraria Indonesia, 11 (2).

Wonte, A. (2022) 'Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pembuatan Akta Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016...', Lex Administratum, 10 (2).

Badan Pusat Statistik Kota Padang (2025) Padang Kota Dalam Angka. <https://padangkota.bps.go.id/> (Diakses: 12 Oktober 2025).

Detik.com (2025) Berita Terkini. <https://www.detik.com> (Diakses: 12 September 2025).

Langgam.id (2025) Berita Sumatera Barat . <https://langgam.id> (Diakses: 12 September 2025).

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (2019) Perpres No. 59/2019: Ada Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. <https://setkab.go.id/perpres-no59-2019-ada-tim-terpadu-pengendalian-alih-fungsi-lahan-sawah/> (Diakses: 2 Desember 2025).

Sumbar Antara News (2025) Berita Sumatera Barat. <https://sumbar.antaraneews.com> (Diakses: 12 September 2025).